

PERAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APLIKASI SADASBOR DALAM MENUNJANG REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Wilianto¹, Rini Werdiningsih², Christine Diah³

^{1,2,3} FISIP UNTAG SEMARANG Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang,
Jawa Tengah, Indonesia, email; wilianto@gmail.com
Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP UNTAG Semarang
Jl. Pawiyatan luhur Bendan Duwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
email: wilianto@gmail.com¹, rini-werdi@untagsmg.ac.id², chrisayudia@untagsmg.ac.id³

Abstrak

Beberapa tahun terakhir ini pemerintah telah memanfaatkan kemajuan teknologi dalam berbagai aktifitasnya, di antaranya dalam pelayanan publik berbasis teknologi informasi telah mendapat perhatian. Pemerintah melalui penerapan e- government dan telah memperoleh komitmen atau dukungan yang kuat melalui Instruksi Presiden R.I Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan e-government.. Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan instansi yang sudah memiliki sistem informasi untuk kepegawaian yang mencakup pendaftaran CPNS, layanan mutasi pegawai yang mencakup pengadaan NIP, kenaikan pangkat pensiun, dan e- PUPNS. e-PUPNS merupakan sistem pendataan ulang PNS elektronik untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya, dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang mendukung pengelolaan manajemen yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara. Penggunaan teknologi kepegawaian yang terbaru dari BKN ada pemutakhiran data base seluruh Aparatur Sipil Negara yaitu Updateng data pegawai melalui aplikasi My SAPK BKN. Proses penerapan teknologi pada administrasi kepegawaian merupakan cara pemerintah dalam hal membangun dan menunjang reformasi birokrasi pada Aparatur Sipil Negara. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di era digitalisasi 4.0 serta mendukung sistem pemerintahan yang *good governance* dan penerapan *e governance* adalah penerapan Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi (SADASBOR). Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi (SADASBOR) merupakan suatu totalitas yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak. Perangkat penyimpan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kedisiplinan Pegawai.

Katakunci : Reformasi Birokrasi, Aparatur Sipil Negara, *good governance*, *e governance*, SADASBOR

Abstract

In recent years, the government has taken advantage of technological advances in various activities, including information technology-based public services that have received attention. The government through the implementation of e-government and has obtained a strong commitment or support through the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 3 of 2003 concerning National policies and strategies for the development of e-government. The State Civil Service Agency (BKN) is an agency that already has an information system for personnel that includes CPNS registration, employee transfer services which include the procurement of NIP, promotion to retirement, and e-PUPNS. e-PUPNS is an electronic data collection system for civil servants to obtain accurate, reliable, and integrated data, as a basic requirement in developing a personnel information system that supports rational management of state apparatus resources. The use of the latest personnel technology from BKN is updating the database of all State Civil Apparatuses, namely updating employee data through the My SAPK BKN application. The process of applying technology in personnel administration is the government's way of building and supporting bureaucratic reform in the State Civil Apparatus. The Tasikmalaya Regency Government in order to carry out bureaucratic reform in the digitalization era 4.0 and to support a good governance system and the implementation of e governance is the application of the Integrated Bureaucratic Administration Service System (SADASBOR). The Integrated Bureaucratic Administration Service System (SADASBOR) is an integrated totality consisting of processing equipment including collectors, procedures, processing personnel and software. Storage devices include data centers and data banks as well as communication devices that are interrelated, dependent and mutually determined in the context of providing information in the field of employee discipline

Keywords : *Bureaucratic Reform, State Civil Apparatus, good governance, e governance, SADASBOR*

PENDAHULUAN

Dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014. Upaya untuk mewujudkan sasaran reformasi birokrasi telah dilakukan, meliputi: (a) penataan kelembagaan instansi pemerintah, yang didukung oleh pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemda; (b) pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit; (c) percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan; dan (d) penetapan dan penerapan Sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik. Namun, upaya yang telah dilakukan tersebut perlu terus ditingkatkan karena pencapaian sasaran reformasi birokrasi dan tata kelola secara umum masih kurang menggembirakan. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak akan tercapainya beberapa target pada tahun 2014, seperti persentase Pemda dengan opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemda (daerah), peringkat kemudahan berusaha, dan indeks efektifitas pemerintahan.

Reformasi birokrasi (administrasi negara) dan *good governance* merupakan dua konsep utama bagi perbaikan kondisi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedua konsep ini merupakan konsep yang saling terkait satu sama lainnya dan bukanlah merupakan konsep yang relatif baru. Namun demikian, sampai saat ini dan bahkan sampai tahun-tahun mendatang kedua konsep tersebut akan sangat berperan dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah yang menentukan dalam pencapaian kemajuan negara tersebut. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efisien tetapi juga mampu menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan daripada reformasi birokrasi akan sangat mendukung dalam penciptaan *good governance*. Karena reformasi birokrasi merupakan inti dari upaya penciptaan *good governance*.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan yang mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (bussines proses) dan sumber daya aparatur. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan nasional yang disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Salahsatu out put reformasi birokrasi adalah pelayanan yang lebih baik dan tidak bertele-tele. Pengertian dan sasaran dari reformasi birokrasi adalah suatu proses untuk mengubah proses dan prosedur birokrasi public dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional . pada dasarnya inti reformasi birokrasi itu mencakup dua aspek, pertama mengubah seluruh mekanisme kerja agar menjadi lebih efektif dan efisien,, transparan, professional dan akuntabel. Jadi yang diubah dalam reformasi birokrasi adalah sistemnya atau bagaimana sebuah mekanisme kerja lebih terukur dan akuntabel serta seluruh bagian atau unit kerja harus bekerja dengan baik, Kedua melakukan reformasi seluruh Sumber Daya Manuasi (SDM). Asekan yang kedua merupakan implikasi dari reformasi birokrasi yang pertama. Dalam menempatkan orang juga harus sangat terukur dan kompetensinya harus relevan.

Modernisasi dan reformasi birokrasi dapat meliputi aspek eksternal dan internal. Dalam aspek eksternal, reformasi dan modernisasi birokrasi diletakkan pada penciptaan kontrak baru antara birokrasi dan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi

masyarakat dan tanggung jawab pelayanan publik. Dalam aspek internal, reformasi dan modernisasi birokrasi di Indonesia dapat diletakkan pada tiga titik tekan yaitu: debirokratisasi struktur internal birokrasi, modernisasi proses internal birokrasi, dan peningkatan kemampuan aparat birokrasi.

Reformasi birokrasi bukanlah sekadar perubahan struktur dan reposisi birokrasi. Lebih dari itu reformasi birokrasi harus meliputi perubahan sistem politik dan hukum secara menyeluruh, perubahan sikap mental dan budaya birokrat dan masyarakat, serta perubahan *mindset* dan komitmen pemerintah serta partai politik. Harus terdapat kejelasan batas antara pejabat karir dan pejabat politik baik birokrasi pusat maupun daerah. Hal ini juga dimaksudkan untuk membatasi pejabat politik dalam birokrasi. Sebagaimana diterapkan di negara-negara maju, maka pejabat politik hanya dimungkinkan jika dipilih secara langsung rakyat atau mendapatkan persetujuan dari pejabat yang dipilih oleh rakyat. Profesionalitas dan netralitas birokrasi karena itu harus merupakan sasaran utama reformasi birokrasi. Hal terpenting dalam reformasi birokrasi adalah komitmen dan *national leadership*. Tanpa komitmen baik dari eksekutif, legislatif dan yudikatif, reformasi birokrasi hanyalah *blueprint* yang berada dalam ruang vakuum.

Beberapa tahun terakhir ini pemerintah telah memanfaatkan kemajuan teknologi dalam berbagai aktifitasnya, di antaranya dalam pelayanan publik berbasis teknologi informasi telah mendapat perhatian. Pemerintah melalui penerapan *e- government* dan telah memperoleh komitmen atau dukungan yang kuat melalui Instruksi Presiden R.I Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan *e- government*.. Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan instansi yang sudah memiliki sistem informasi untuk kepegawaian yang mencakup pendaftaran CPNS, layanan mutasi pegawai yang mencakup pengadaan NIP, kenaikan pangkat pensiun, dan e- PUPNS. e-PUPNS merupakan sistem pendataan ulang PNS elektronik untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya, dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang mendukung pengelolaan manajemen yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara.

Penggunaan teknologi kepegawaian yang terbaru dari BKN ada pemutakhiran data base seluruh Aparatur Sipil Negara yaitu Updateng data pegawai melalui aplikasi *My SAPK BKN*. Proses penerapan teknologi pada administrasi kepegawaian merupakan cara pemerintah dalam hal membangun dan menunjang reformasi birokrasi pada Aparatur Sipil Negara. Kehadiran Revolusi Industri 4.0 yang banyak mengenalkan tata cara dan prosedur system kerja yang serba berteknologi digital akan dan telah mewabah di pelbagai belahan dunia ini. Sistem kerja yang serba *online* melewati pelbagai macam cara mulai dari internet,

facebook, *whatsapp*, telepon pintar, dan sistem aplikasi yang berteknologi dan yang sejenisnya telah mengubah perilaku pelayanan tata kelola manajemen pemerintahan. Secara cepat maupun lambat laun akan membawa kehidupan baru bagi pertumbuhan dan perkembangan birokrasi pemerintahan. Hubungan manusia tidak lagi diatur oleh aturan ketentuan yang kaku dan birokratis, melainkan tata sikap aplikasi internet, *whatsapp* dan jenis teknologi digital lainnya mulai dilakukan sehari-hari.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di era digitalisasi 4.0 serta mendukung sistem pemerintahan yang *good governance* dan penerapan *e governance* adalah penerapan Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi (SADASBOR). Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi (SADASBOR) merupakan suatu totalitas yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak. Perangkat penyimpan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kedisiplinan Pegawai.

Sadasbor ini adalah salah satu instrument penerapan meritokrasi dalam birokrasi yang artinya menjamin birokrasi memiliki kinerja pelayanan publik yang mumpuni yaitu birokrasi yang mampu membuat desain program yang lebih tepat sasaran dan memberikan hasil yang optimal.

METODOLOGI

Metode yang digunakan pada pembuatan jurnal ini adalah study literatur atau kajian pustaka, dimana penulis melakukan kajian-kajian terhadap tulisan orang lain baik itu dalam bentuk buku, jurnal maupun hasil analisa yang telah dipublikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi (SADASBOR) merupakan suatu totalitas yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak. Perangkat penyimpan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kedisiplinan Pegawai.

Dinas Komuniiasi dan Informasi Kabupaten Tasikmalaya sebagai leading sector atau penanggung jawab pelaksanaan sadasbor bias diartikan sebagai perangkat pengolah dan perangkat penyimpanan. Aplikasi SADASBOR ini berisi tentang seluruh kegiatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yaitu mulai dari absensi, buku harian kerja, sasaran kinerja pegawai baik bulanan maupun tahunan dan Besaran tambahan penghasilan pegawai yang diterima setiap bulannya.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa penggunaan aplikasi SADASBOR ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang *good governance, e governance* dan *clean governance*, dimana untuk menciptakan pemerintahan tersebut diperlukan ASN yang berkinerja dengan baik, pegawai ASN bertugas sebagai pelayanan public. Hal ini beriringan dengan amanat reformasi birokrasi kondisi yang sebelum terbitnya kebijakan reformasi birokrasi sangat rentan dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Oleh karena sebab itu pegawai ASN yang professional dan berintegritas diperlukan. Dalam hal keterkaitannya dengan aplikasi SADASBOR yaitu pada aplikasi SADASBOR ini semua pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan untuk membuat target kinerja dan sasaran kinerja pegawai baik yang bulanan maupun tahunan, karena nanti setiap bulan dan tahunnya akan di lakukan penilaian oleh atasan langsung sehingga dapat diketahui berapa persen ketercapaiannya. Untuk dalam hal kedisiplinan presensi kehadiran pun seperti itu seluruh Pegawai ASN diwajibkan untuk mengisi absensi datang dan pulang sesuai dengan regulasi tentang jam kerja, apabila tidak hadir atau keterlambatan datang dan pulang sebelum waktunya maka secara otomatis akan terekam dan mengurangi jumlah penerimaan pada tambahan penghasilan pegawai untuk selanjutnya mengenai hal tersebut di atur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya nomor 80 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di wajikan untuk menggunakan dan menginstal aplikasi tersebut melalui play store karena untuk presensi absensi hanya bisa di gunakan dari gadget/Handphone karena gps akan membaca lokasi pegawai ketika melaksanakan absen, sedangkan untuk mengisi buku harian kerja/kegiatan dan sasaran kerja serta melihat menu tunjangan perbaikan penghasilan harus melalui browser pc, laptop atau gadget.

Berdasarkan laporan evaluasi Semester 1 Tahun 2021 dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tasikmalaya perihal penggunaan sadasbor maka diperoleh laporan 80 % Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sadasbor dengan Presensi kehadiran datag dan Pulang 100 %, adapun sisanya sebanyak 20 % pegawai tidak menggunakan sadasbor

karena terkait akses internet yang tidak masuk ke daerah tersebut. Selain itu juga di laporkan bahwasannya penilaian kinerja pegawai menjadi lebih terukur dan terlihat pencapaiannya.

Selain program sadasbor ini di Kabupaten Tasikmalaya juga terdapat sejumlah program inovasi di Kabupaten Tasikmalaya. Sejumlah program tersebut dibagi dalam tiga kelompok besar program yakni program **reformasi birokrasi** sebagai wujud pembenahan aspek-aspek internal kelembagaan pemerintahan daerah, program *re-engineering* pelayanan publik dengan penataan **pelayanan prima** dalam fasilitasi dan pemberian dukungan terhadap upaya masyarakat membangun diri sendiri, serta program **pemberdayaan masyarakat & PNS** dengan paket-paket program yang mendorong masyarakat dan PNS menjadi maju dengan kapasitas yang mereka miliki.

Dalam bidang reformasi birokrasi, program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terbagi dalam berbagai aspek yakni aspek struktur pemerintahan, aspek budaya SDM pemerintahan, aspek *e-government* serta aspek pengelolaan anggaran daerah. Pada aspek struktur pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan berbagai program seperti: restrukturisasi satuan kerja perangkat daerah yang miskin struktur tapi kaya fungsi dan sesuai dengan kebutuhan daerah; pembentukan lembaga *ad hoc* seperti *marketing unit* dan *engineering services* yang tidak masuk struktur tetapi mengemban fungsi yang justru menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan lainnya secara lebih optimal; serta pengembangan fungsi satuan kerja sebagai sebuah korporasi yang mengusung fungsi sosial. Dalam hal ini satuan kerja diupayakan menjalankan berbagai fungsi sebagai pusat pendapatan (*revenue center*), pusat produksi (*production center*) dan pusat pelatihan (*training center*).

Fungsi pemerintah sebagai pusat pendapatan dimanifestasikan dengan mengupayakan segala program yang dapat mendatangkan penghasilan tambahan yang sah bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai suatu lembaga pemerintahan sekaligus bagi pegawai yang beraktivitas di dalamnya. Dijalankannya fungsi pemda sebagai *revenue center* bukan hanya menutupi kekurangan pemasukan atau PAD melainkan juga membalik citra negatif pemda sebagai sumber pengeluaran (*cost-center*). Sementara itu, fungsi sebagai pusat produksi dan pusat pelatihan dilaksanakan melalui sinergi dengan agenda pemberdayaan masyarakat yang banyak diemban satuan kerja lain, misalnya Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badan Diklat) melalui pembentukan *production & training center*.

Pada aspek budaya SDM pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan berbagai program seperti: komunikasi intensif dalam rangka internalisasi nilai-nilai pelayanan publik dalam pengelolaan roda pemerintahan sehingga memiliki citra positif

di masyarakat; pemberlakuan sistem *handkey* dalam absensi pegawai; pendirian klinik terapi holistik dalam mewujudkan kesejahteraan lahiriah-batiniah pegawai; pengembangan *assessment center* guna menciptakan mekanisme penilaian pegawai yang lebih akurat dan terukur; serta membuka peluang wirasusaha bagi PNS dalam rangka turut meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Pada aspek *e-government*, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan berbagai program seperti: pembangunan jaringan pemerintahan secara online dengan perangkat wireless; pengoperasian *teleconference* sampai ke tingkat desa/kelurahan dalam rangka memperlancar hubungan komunikasi di lingkungan pemerintah kabupaten; pembangunan data kependudukan sipil secara elektronik dengan menggunakan *single identity number*; serta dengan mengembangkan mekanisme pemilihan kepala desa secara elektronik.

Pada aspek pengelolaan anggaran daerah, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan program efisiensi anggaran. Hal ini diterapkan dengan penekanan belanja dinas-dinas yang diarahkan pada sasaran yang jelas dan bisa dioptimalkan. Sejumlah kegiatan dan belanja lainnya yang sebelumnya membutuhkan anggaran dalam jumlah tertentu bisa diturunkan tanpa mengurangi kualitas pencapaian tujuan kegiatan tersebut.

Dalam bidang pelayanan prima, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan berbagai program seperti: pelayanan dengan konsep *small management* dengan melimpahkan sebagian kewenangan dan fungsi pemerintahan kabupaten ke kecamatan dan desa/kelurahan; mengembangkan wisata pelayanan publik; serta membebaskan biaya pembuatan akte kelahiran dan pengurusan Surat Ijin Usaha bagi pengusaha pemula.

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan PNS, program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari program penyehatan lingkungan seperti pengelolaan sampah terpadu serta sejumlah program dalam bidang pertanian. Program dalam bidang pertanian ini diantaranya meliputi program revitalisasi pertanian organik; peningkatan teknologi pertanian; pengembangan *homebase* pengelolaan padi; pengembangan simbiosis antara petani dengan PNS penyuluh pertanian; diversifikasi usaha pekerjaan petani; peternakan kandang komunal; pengembangan kluster peternakan

KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di era digitalisasi 4.0 serta mendukung sistem pemerintahan yang *good governance* dan penerapan *e governance* adalah penerapan Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi (SADASBOR). Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi (SADASBOR) merupakan suatu totalitas yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak. Perangkat penyimpan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kedisiplinan Pegawai. Pada penerapan aplikasi ini seluruh Kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menjadi terukur karena setiap awal bulan akan diwajibkan membuat Sasaran Kinerja Pegawai baik bulanan maupun tahunan apabila aplikasi SADASBOR dimana pada setiap akhir bulan dan akhir tahun akan dilakukan penilaian kinerja pada masing-masing pegawai oleh atasan langsungnya, tentunya sebagai bukti telusur juga dilengkapi oleh dokumen kegiatan berupa buku harian kerja dan agenda kegiatan pegawai selama satu bulan. Intinya setelah penggunaan SADASBOR maka seluruh kinerja ASN di Kabupaten Tasikmalaya menjadi lebih terarah dan terukur sehingga akan terbentuk suatu sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan terdapat sejumlah faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi di daerah:

Pertama, *political will* dan komitmen dari Kepala Daerah sebagai pimpinan tertinggi birokrasi di daerah untuk melaksanakan program. Dimulai dengan membangun kesamaan visi, misi dan tujuan dengan aparat birokrasi, kepercayaan dan keterlibatan birokrasi dalam pelaksanaan program sangat menentukan. Artinya kemauan dan komitmen politik dari Bupati saja tidak cukup tanpa dukungan dan motivasi aparat birokrasi untuk melaksanakan program tersebut. Apalagi jika terdapat sejumlah orang dalam internal birokrasi yang kontraproduktif terhadap gagasan dan pelaksanaan program.

Kedua, kemampuan Kepala Daerah beserta aparat untuk **melibatkan organisasi lokal** seperti lembaga dan tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pihak-pihak terkait lainnya dalam penyusunan prioritas juga dalam pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program. Dengan keterlibatan semua pihak dalam program, akan meningkatkan dukungan politik, motivasi dan penerimaan masyarakat terhadap program. Struktur sosial dan budaya lokal yang akomodatif, merupakan faktor penguat keberhasilan program.

Ketiga, adanya **program efisiensi pembangunan** di semua sektor serta **upaya mengubah paradigma dan budaya birokrasi**. Pelaksanaan program pada awalnya akan merupakan *cost center* karena membutuhkan anggaran yang relatif besar. Untuk itu, diperlukan efisiensi terhadap semua sektor guna memenuhi kebutuhan pembiayaan ini. Disamping komitmen terhadap efisiensi, perlu dibuat *grand strategy* seperti mekanisme kontrol harga dalam pembelanjaan barang dan pembelanjaan yang seminimal mungkin (prinsip kewirausahaan dalam pemerintahan). Hal lainnya yang harus dilakukan adalah terkait dengan paradigma dan budaya aparat birokrasi yang harus diubah sehingga dapat mendukung secara optimal keberadaan inovasi program. Keberhasilan program salah satunya ditentukan oleh dukungan paradigma dan budaya aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Upaya mengubah paradigma dan budaya aparat birokrasi ini juga menjadi hal yang signifikan mengingat tantangan yang semakin besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah di era *era governance* saat ini. Di era ini, aparat pemerintah daerah harus mampu berinteraksi secara memadai dengan berbagai *stakeholder* dan mengubah pola interaksinya sebagai mitra daripada sebagai penguasa.

Keempat, **pemilihan prioritas program**. Keberhasilan dari program juga ditentukan oleh keberpihakan program-program tersebut terhadap kebutuhan masyarakat. Karenanya, dalam pengembangan suatu program perlu diperhatikan sejauhmana program tersebut sangat dekat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan keterkaitan dan sinergitas antara satu program dengan program lainnya.

Dari sejumlah faktor tersebut, maka peranan kepemimpinan merupakan faktor yang sangat menentukan. Karenanya yang perlu dilakukan untuk dapat mendorong reformasi birokrasi dan *good governance* di daerah lainnya adalah bagaimana kita dapat turut memastikan terpilihnya figur-figur yang memiliki komitmen dan kepemimpinan terhadap reformasi birokrasi untuk dapat menjadi Kepala Daerah. Karenanya momentum pemilihan Kepala Daerah secara langsung dapat menjadi batu pijakan utama guna mewujudkan kondisi itu. Selain itu, partisipasi secara aktif dari masyarakat serta keberadaan aturan perundang-undangan yang memadai terkait reformasi birokrasi dan *good governance* yang akan menjadi payung dalam proses pelaksanaan reformasi birokrasi dan *good governance* tersebut..

DAFTAR PUSTAKA

- Bamang triyono, Haryo Raharjo, Faiq, Meitha ika pratiwi, Novi Mulia AYu, and Tini Partini, *Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi*. 2013.
- E. Prasajo and T. Kurniawan, “Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia,” *Symp. A Q. J. Mod. Foreign Lit.*, pp. 1–15, 2008, [Online]. Available: <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=360656420083251686&btnI=1&hl=id>.
- B. R. A. G. H. F. A. Pritasari, D. Pringgabayu, and D. M. A. Ramdlany, *Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi*. 1384.
- F. G. Tulus and G. B. Tampi, “PERAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,” 1993.
- R. Katharina, *Reformasi Birokrasi Indonesia Dan Revolusi Industri 4.0*. 2019.